

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH RT 05 DAN RT 08 KELURAHAN SIDOTOPO KOTA SURABAYA

Fatma Sari¹, Djoko Widodo², Novaria Rachmawati³

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email :

fatmhayofatmha24@gmail.com

Abstrak

Dalam pemberdayaan usaha mikro di kota Surabaya khususnya di wilayah Sidotopo Rt 05 dan Rt 08 terdapat keberadaan UMKM. Dalam Upaya pemberdayaan usaha mikro yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agostino 2006 memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan yakni : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun tujuan dari peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui dana bantuan Umkm di Rt 05 dan Rt 08 Sidotopo Kota Surabaya. Dalam pembuatan skripsi menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat studi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan belum optimal dan belum sesuai target karena hanya mengetahui secara garis besar saja, sumberdaya merupakan yang paling mempengaruhi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm yakni ketersediaan pelaksana masih kurang di Kelurahan Sidotopo, karakteristik organisasi pelaksana menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan demokrasi, komunikasi antar organisasi pelaksana hanya pada TOP pelaksana saja sehingga tidak ada kejelasan, keselarasan dan keseragaman informasi, disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari penerima/pemohon sendiri yang selalu menerima dan pasrah, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm, disinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup keluarga.

Penulis memberikan rekomendasi upaya pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo untuk netral dan tetap melakukan komunikasi secara hierarkis, formal dan fleksibel, sebaiknya terdapat Standar Operasional prosedur yang jelas, sosialisasi, edukasi dan evaluasi harus tegas dan ketat serta ada tindak lanjut dan dalam memverifikasi data penerima/pemohon harus realistis, akurat dan terpecaja.

Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Usaha Mikro

Abstract

In the empowerment of micro businesses in the city of Surabaya, especially in the sidotopo rt 05 and Rt 08 areas there is the power of MSMEs. In the efforts to empower micro businesses in accordance with surabaya city regulation No. 01 of 2021 on Micro Business Empowerment according to Van Meter and Van Horn (1975) in Agostino 2006 provides the view that policy implementation is influenced by six interrelated variables, namely: standards and objectives of policies / measures and objectives of policies, resources, characteristics of implementing organizations, dispositions or attitudes of the implementers, communication between related organizations and implementation activities, social, economic, and political environment. The purpose of the researchers want to know and analyze the implementation of micro-business empowerment through umkm assistance funds in Rt 05 and Rt 08 Sidotopo Surabaya. In the making of the thesis use qualitative descriptive method to describe the phenomenon that existed at the time of study.

Based on the results of research that has been done it is known that the standards and policy objectives are not optimal and have not met the target because it only knows in general, resources are the most influential in the implementation of the Micro Business Empowerment program through the distribution of Umkm assistance funds, namely the availability of implementers is still lacking in Sidotopo Village characteristics of implementing organizations apply the principles of openness, transparency, and democracy, communication between implementing organizations only on the top implementers only so that there is no clarity, alignment and uniformity of information, disposition or attitude of the implementer in this case knowledge, understanding and deepening of the policy is lacking, response from the recipient / applicant himself who always accepts and submits, social, economic and political environmental factors there is a community strategy to improve economic conditions with the Micro Business Empowerment Program through the distribution of Umkm assistance funds, it is signaled that there is a political conflict with the utilization of positions with the family scope.

Empowerment of Micro Enterprises through the distribution of umkm assistance funds, especially in the Sidotopo Village area to be neutral and continue to communicate in a hierarchical, formal and flexible manner, there should be a clear standard of procedure, socialization, education and evaluation must be firm and strict and there is follow-up and in verifying the recipient /applicant data must be realistic, accurate and reliable.

Keywords: Implementation, Empowerment, Micro Enterprise

PENDAHULUAN

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto et al., 2012).

Dalam membangun potensi daerah diperlukan peran pemerintah daerah. Salah satu peran pemerintah daerah adalah menggali potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki kedudukan dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memiliki potensi sebagai penghasil devisa dari kegiatan ekspor. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam proses pertumbuhan UMKM.

Bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Lebih lanjut usaha mikro di Daerah juga memiliki peran penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pemberdayaan usaha mikro di Daerah agar usaha mikro di daerah dapat tetap bertahan dan

dapat bersaing. Bahwa pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha mikro di Daerah dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah serta guna menjamin kepastian dan keadilan usaha bagi pelaku usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis kemasyarakatan di Daerah. Adapun pelaksanaan pemberdayaan dimaksud dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan (Walikota Surabaya, 2018).

Kepedulian pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 1 ayat 10 sebagai berikut: "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri."

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengungkap peran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Rt 05 dan Rt 08 Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. "penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (McMillan&Schumacher,2003).

Fokus penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis pemberdayaan usaha mikro melalui dana bantuan di warga rt 05 dan rt 08 Kelurahan

Sidotopo Kota Surabaya apabila ditinjau dari teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan dipengaruhi 6 variabel-variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi/sikap para pelaksana, lingkungan social ekonomi dan politik, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi serta wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada pelaksana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah antara lain : (1) Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (2) Sekretariat kelurahan Sidotopo (3) Kasi Pembangunan dan Trantib Kelurahan Sidotopo (4) Kasi Pemerintahan Kelurahan Sidotopo (5) warga penerima/pemohon bantuan umkm. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, dan Profil Kelurahan Sidotopo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dibahas dalam bab metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Rt 05 dan Rt 08 Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Pada sub bab ini penulis akan membahas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk penyaluran dana bantuan

Umkm di warga Rt 05 dan Rt 08 Sidotopo dan hubungan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk penyaluran dana bantuan Umkm di warga Rt 05 dan Rt 08 Sidotopo dengan dipengaruhi variabel standar dan Sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan,sumberdaya,karakteristik organisasi pelaksana,sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dan lingkungan social, ekonomi dan politik. Pertama pembahasan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam bentuk penyaluran dana bantuan Umkm di Kelurahan Sidotopo, Kedua akan membahas hubungan pelaksanaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi yaitu seperti yang dikatakan atau dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975) dan dalam Agostino yang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel, yakni : (1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) Karakteristik Organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (6) lingkungan sosial,ekonomi dan politik,. Dan keenam variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil data yang telah diuraikan pada penyajian data terkait pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di wilayah rt 05 dan rt 06 Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya maka dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang dipengaruhi oleh 6 variabel,yakni :

(1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) Karakteristik Organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik,. Dan keenam variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan hasil penyajian data, berikut adalah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya apabila ditinjau dari teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan dipengaruhi 6 variabel-variabel dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut : (a) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, belum optimal dan belum sesuai target karena pelaksana dan penerima/pemohon hanya mengetahui secara garis besar saja (b) Sumberdaya yang paling mempengaruhi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm di Kelurahan Sidotopo yakni keterbatasan pelaksana. (c) Karakteristik organisasi pelaksana, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Kelurahan Sidotopo menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan demokrasi (d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan kegiatan pelaksanaan, di lapangan informasi dan koordinasi yang lengkap

hanya pada TOP pelaksana sehingga tidak ada kejelasan, keselarasan dan keseragaman terkait informasi dari tingkatan hierarki jadi komunikasinya tidak berjalan dengan baik (e) Disposisi atau sikap para pelaksana, dalam hal pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari penerima/pemohon sendiri yang selalu menerima dan pasrah, pelaksana yang hanya berpangku tangan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro dalam penyaluran dana bantuan umkm, di sinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup penerima sendiri.

Berikut faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya.

1. Faktor Pendukung yaitu : Adanya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas Pendidikan ,berkompeten dan, Sumberdana yang cukup.
2. Faktor penghambatnya yaitu : Adanya persepsi pelaksana yang tidak mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm, Adanya respon dari pelaksana yang setengah-setengah dan respon penerima dan pemohon yang pasrah, acuh tak acuh, tidak ada sikap timbal balik.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm di

Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya belum tepat sasaran sebagaimana yang telah dilakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya apabila ditinjau dari teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan dipengaruhi 6 variabel-variabel dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :
 - a) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, belum optimal dan belum sesuai target karena pelaksana dan penerima/pemohon hanya mengetahui secara garis besar saja
 - b) Sumberdaya yang paling mempengaruhi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm di Kelurahan Sidotopo yakni keterbatasan pelaksana.
 - c) Karakteristik organisasi pelaksana, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Kelurahan Sidotopo menerapkan prinsip keterbukaan,transparansi dan demokrasi
 - d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, di lapangan informasi dan koordinasi yang lengkap hanya pada TOP pelaksana sehingga tidak ada kejelasan,

keselarasan dan keseragaman terkait informasi dari tingkatan hierarki jadi komunikasinya tidak berjalan dengan baik

- e) Disposisi atau sikap para pelaksana, dalam hal pengetahuan,pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari penerima/pemohon sendiri yang selalu menerima dan pasrah, pelaksana yang hanya berpangku tangan
 - f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro dalam penyaluran dana bantuan umkm, di sinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup penerima sendiri.
2. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

- a. Faktor Pendukung yaitu Adanya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas Pendidikan ,berkompetens dan, Sumberdana yang cukup.
- b. Faktor penghambatnya yaitu Adanya persepsi pelaksana yang tidak mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyaluran dana bantuan Umkm, Adanya respon dari pelaksana yang setengah-setengah dan respon penerima dan pemohon

B. Saran

Dari semua permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan harus benar-benar netral dan ketat sehingga tidak memicu adanya konflik politik
2. Koordinasi dan informasi agar melalui tingkatan hierarkis dan secara formal serta fleksibel agar dapat tersampaikan dengan jelas dan merata
3. Dalam pelaksanaann kebijakannya sebaiknya harus ada standart operasional procedure (SOP) yang jelas
4. Sosialisasi, edukasi dan evaluasi harus tegas dan ketat dan ada tindak lanjut secara cepat
5. Dalam verifikasi atau pengecekan kembali data pemohon bantuan harus realistis, akurat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., Mindarti, L. I., & Hadi, M. (2014). UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) INDUSTRI KRUPUK RENGGINANG (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(11), 1–7.
- Anderson, James E. (1975). *Public Policy Making, Reuel and Winston*. Holt.
- Carlolina, L. A., Ilmu, J., & Negara, A. (2020). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA MELALUI PEMBUATAN PEYEK SISIK IKAN (Studi Kasus: Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.). 4(1), 46–54. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/886/479>
- Denzin, N. K. dan Y. S. L. (eds.). (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.) Terj. Dariyatno dkk.
- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA. (n.d.). *profil dinas koperasi dan usaha mikro kota surabaya*. Retrieved June 15, 2021, from <https://dinkopum.surabaya.go.id/profile/#1556522134330-aobd272f-452d>
- ferry duwi kurniawan, luluk fauziah. (1386). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. 283.
- Herlyansah, P. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. In *Ilmu Adminitrasi Negara*.
- hestanto. (2016). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. <https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/>
- Ju, J., Wei, S. J., Savira, F., Suharsono, Y., Aragão, R., Linsi, L., Editor, B., Reeger, U., Sievers, W., Michalopoulou, C., Mimis, A., Editor, B., Ersbøll, E., Groenendijk, K., Waldrauch, H., Waldrauch, H., Bader, E., Lebhart, G., Neustädter, C., ... Saillard, Y. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf <https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide>
- Latisia, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 62–75. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v1i2.202>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.
- Siti Hotimah, B. K. (2015). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (pp. 22–52). <https://core.ac.uk/download/pdf/293642541.pdf>
- Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2012). *Strategi Pemberdayaan*

- UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen.* 1–32.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Suharto. (2014). *Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM.* <https://text-id.123dok.com/document/lzgwd82yo-3-konsep-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm.html>
- Van meter, d .s. and van horn, c. . (1974). *The policy implementation process : aconceptual framework.* "Administration and society.
- Walikota Surabaya. (2018). *Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur.* 1965, 1–7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf